



## TIONGKOK DAN SENGGKETA TERITORIAL DI LAUT CINA SELATAN

Simela Victor Muhamad\*)

### Abstrak

*Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlah negara ASEAN masih menjadi pemberitaan media massa hingga saat ini. Pasalnya, situasi di perairan sengketa menunjukkan perkembangan yang belum kondusif yang disebabkan, antara lain, masih adanya aksi saling menuding telah melakukan provokasi dan pelanggaran wilayah di antara pihak-pihak yang bersengketa. RRT, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, memiliki kepentingan besar atas wilayah perairan yang mengandung nilai strategis ini. Sengketa yang berlarut-larut sudah tentu harus dicari solusi damai untuk menghindari implikasi secara politik, keamanan dan ekonomi bagi kawasan. ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya, sudah tentu juga perlu mengambil peran dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial ini.*

### Pendahuluan

Sengketa teritorial antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlah negara di perairan kawasan (khususnya Laut Cina Selatan/LCS) belum juga surut dari pemberitaan media massa. Salah satu contohnya adalah pemberitaan terkait penolakan RRT atas keputusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration/PCA*) yang memberi negara itu waktu enam bulan (hingga 15 Desember 2014) untuk menyerahkan bukti-bukti tandingan. Perintah itu diberikan guna memberi kesempatan RRT merespons gugatan Filipina melalui PCA terkait sengketa di LCS. Sejauh ini, RRT selalu menentang

upaya internasionalisasi masalah LCS, termasuk melalui PCA, dan lebih memilih jalur bilateral untuk menyelesaikannya dengan negara-negara yang bersengketa, meskipun belakangan RRT mengadukan Vietnam ke PBB terkait dengan tindakan kapal-kapal Vietnam yang dianggap membahayakan kapal-kapal mereka di perairan sengketa.

Kajian singkat ini mencoba menganalisis mengapa RRT bersikeras ingin mempertahankan perairan LCS, apa yang menjadi kepentingannya? Apa implikasinya terhadap kawasan jika sengketa teritorial di perairan ini terus berlarut? Pembahasan

\*) Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id.



terlebih dahulu mengemukakan secara singkat nilai strategis LCS.

## Nilai Strategis LCS

LCS merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar, karena di dalamnya terkandung potensi minyak bumi dan gas alam, dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional. Perkiraan tentang ketersediaan minyak dan gas berkisar di antara 1-2 milyar barel sampai 225 milyar barel. Estimasi lain menyebutkan, kandungan minyak di kawasan ini sebanyak 213 bbl (*billion barrels*). Karena ketegangan-ketegangan kerap terjadi di wilayah ini, perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi tidak dapat melakukan survei secara komprehensif di wilayah yang dipersengketakan itu, sehingga angka-angka yang lebih pasti tentang persediaan sumber daya minyak dan gas bumi tidak dapat diperoleh atau diungkapkan.

Nilai strategis ini juga terkait dengan kedudukannya yang sangat dekat dengan jalur komunikasi laut (*sea lane of communication/SLOC*) yang sangat vital, yang merupakan penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lebih dari separuh kapal-kapal niaga dari seluruh dunia yang melewati Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok melanjutkan perjalanannya melalui LCS. Kawasan ini senantiasa dilewati oleh kapal-kapal berbagai jenis yang mengangkut sumber energi baik minyak, batu bara maupun gas alam, termasuk 70 persen kebutuhan energi Jepang dan 65 persen kebutuhan energi RRT. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya, selain untuk kepentingan jalur perdagangan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perhatian dan perebutan banyak negara.

Di sini terlihat bahwa sengketa teritorial di LCS sangat dipengaruhi oleh posisi strategis LCS sebagai jalur pelayaran internasional dan potensi sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Ini artinya, LCS merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis sehingga menjadikan kawasan

ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika kawasan LCS, yang memiliki potensi kandungan minyak bumi dan gas alam yang besar serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur pelayaran internasional (perdagangan dan distribusi minyak dunia), menjadi objek perdebatan dan persengketaan sejumlah negara di kawasan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi LCS memiliki nilai strategis yang bisa memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kepentingan negara-negara di kawasan. Lantas, apa yang menjadi kepentingan RRT?

## Kepentingan RRT

Klaim kepemilikan RRT atas kawasan LCS sejak dekade 1970-an didasarkan pada tiga hal pokok, yakni kemajuan ekonomi, politik, dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat memungkinkan adanya peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi RRT, dalam jangka panjang cadangan minyak LCS meskipun dalam jumlah yang belum pasti tetap akan digunakan untuk menopang kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan cadangan minyak berlebih dari sumber baru sudah dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an, yakni ketika produksi minyak RRT mengalami penurunan. Secara eksternal, krisis minyak dunia juga turut memengaruhi perekonomian dalam negeri RRT akan pentingnya cadangan minyak. Kemerosotan ini terus berlanjut sampai dekade berikutnya meskipun tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Kemungkinan fakta ini dipengaruhi oleh cepatnya pertumbuhan penduduk dan industrialisasi selama program modernisasi. Kecenderungan itu berdampak pada permintaan masyarakat terhadap sumber energi terus bertambah.

Sebagai konsekuensinya, RRT harus meningkatkan impor minyak dan gas, memperbaiki kapabilitas memproduksi atau kerja sama gabungan dalam mengeksplorasi daerah tepi pantai. Guna mengurangi impor minyak, dalam jangka panjang negara ini memanfaatkan LCS sebagai tempat memperoleh ladang minyak baru dan sekaligus sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

Dari aspek politik, klaim tersebut berkaitan dengan strategi politik luar negeri

RRT terhadap negara-negara Asia Tenggara. LCS dianggap sebagai teritorial RRT untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Keterlibatan Beijing dalam persengketaan tersebut semata-mata hanya untuk menegaskan kembali perannya sebagai negara besar dalam percaturan regional. Berakhirnya konflik Kamboja telah mengubah peran Beijing yang sebelumnya memanfaatkan isu tersebut untuk menarik negara-negara non-komunis ke dalam pengaruhnya. Melalui langkah ini, RRT dapat mengisolasi posisi Vietnam secara regional. Penyelesaian Kamboja berdampak pada corak politik luar negeri RRT terhadap negara-negara Asia Tenggara terutama yang tergabung dalam ASEAN.

Sebagai upaya alternatif, negara tirai bambu ini berusaha mengembangkan hubungan kerja sama baru, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menghapus kesan “bahaya kuning atau ancaman dari utara”. Isu bahaya kuning seringkali dikaitkan dengan adanya pemberontakan komunis yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara yang secara langsung maupun tidak didukung oleh RRT. Isu tersebut dan juga peristiwa Tiananmen yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM telah menurunkan citra RRT di mata internasional.

Dari bidang pertahanan dan keamanan, klaim RRT berkaitan dengan kesalahan pengalaman masa lalu yang kurang memberi perhatian pada potensi laut. *Pertama*, faktor lemahnya kekuatan laut sekeliling RRT merupakan peluang yang mempermudah penetrasi imperialisme barat yang pada akhirnya berakibat pada terbagi-baginya wilayah RRT ke dalam penguasaan kekuatan asing. Selama Perang Dingin persepsi ancaman terhadap Soviet muncul seiring dengan pembangunan pangkalan militernya di Vietnam. Hal ini terlihat ketika RRT memberi “pelajaran” terhadap Vietnam (1979), Uni Soviet juga telah mengirimkan armadanya sebagai penangkal terhadap inisiatif Angkatan Laut RRT di Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. *Kedua*, dalam kaitannya dengan kepentingan keamanan, RRT membutuhkan suatu armada angkatan laut yang kuat dan pangkalan yang strategis.

Ketegasan sikap RRT dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah LCS juga berkaitan dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan

maritim yang handal, bukan hanya di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara), tetapi juga internasional. Sebagai salah satu sasaran modernisasi, RRT berusaha mengembangkan kemampuan angkatan laut guna meningkatkan statusnya dari “kekuatan pantai” menjadi kekuatan laut biru (*blue water navy*), suatu kekuatan yang memiliki kemampuan proyeksi jauh ke wilayah samudera luas. Artinya, kekuatan laut biru dapat dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin dipertimbangkan di arena internasional.

Selain ketiga hal di atas, RRT sensitif terhadap masalah kedaulatan akibat penindasan asing. Bayang-bayang ancaman dari luar negeri muncul kembali bersamaan dengan pecahnya Soviet menjadi beberapa negara merdeka. Bagi pemimpin RRT, semangat nasionalisme tersebut dapat menyebar sehingga bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Fenomena ini berkaitan dengan daerah-daerah minoritas yang pernah mengalami tekanan berat dari pemerintah pusat. Strategi RRT dalam sengketa LCS merupakan paket yang sama dengan usaha mempertahankan integritas teritorialnya. Kepentingan RRT terhadap LCS, terutama Kepulauan Spratly dan Paracel, tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi dan menunjang program modernisasi namun juga upaya penyatuan Taiwan. Apabila RRT berhasil menguasai dan mengontrol lalu lintas kapal yang melintasi LCS, maka negara ini mampu mempertahankan integritas Taiwan sebagai bagian dari teritorinya.

## Implikasi

Dinamika lingkungan strategis di kawasan LCS belakangan ini memang menunjukkan kondisi yang kurang kondusif. Klaim tumpang tindih wilayah di LCS sebagai pangkal permasalahan sampai saat ini belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Kondisi tersebut telah mendorong negara-negara yang memiliki klaim di wilayah tersebut untuk memainkan pengaruhnya baik melalui jalur diplomatik maupun melalui upaya peningkatan kekuatan pertahanannya di kawasan. Sebagai kawasan yang strategis bagi kepentingan global, sengketa LCS juga telah mengundang pihak-pihak di luar negara pengklaim yang memiliki kepentingan di kawasan untuk melibatkan dirinya. Keterlibatan baik negara pengklaim maupun bukan sudah tentu menimbulkan pro dan

kontra yang berujung pada perbedaan yang mendasar dalam penyelesaian sengketa secara damai. Adanya perbedaan mendasar dalam penyelesaian sengketa, menambah sengketa teritorial di LCS menjadi berlarut-larut, ditambah lagi dasar pengajuan klaim para pihak yang bersengketa sepertinya sulit dipertemukan.

Terlepas dari berlarut dan rumitnya penyelesaian sengketa LCS, ASEAN dan juga Indonesia di dalamnya, tidak bisa begitu saja mengabaikan persoalan ini, karena dampak dari sengketa LCS tersebut terhadap kawasan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam konteks politik, misalnya, sengketa LCS apabila terus meningkat akan berdampak pada terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan. Kondisi tersebut sangat jelas juga bertentangan dengan kepentingan politik Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia (termasuk stabilitas kawasan di dalamnya) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eskalasi sengketa LCS akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia dengan menempatkan Indonesia pada keadaan yang terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu Amerika Serikat dan RRT. Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di LCS juga terancam sebab wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna dan perbatasan dipastikan akan terkena limpahan (*spill over*). Dalam konteks ekonomi, konflik di LCS akan mengancam kelangsungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Timur yang merupakan mitra penting ekonomi Indonesia, di samping terganggunya perairan Natuna sebagai salah satu kawasan eksplorasi sumber daya alam Indonesia yang potensial. Sementara dari sisi pertahanan, kehadiran angkatan bersenjata negara-negara yang bersengketa akan menimbulkan ancaman dan ketegangan baru bagi kawasan.

## Penutup

Memerhatikan perkembangan dan dinamika yang terjadi berkaitan dengan sengketa LCS, maka potensi bagi terjadinya konflik di kawasan ini sangat terbuka, terlebih sikap asertif terus diperlihatkan oleh beberapa negara yang bersengketa. Ini artinya, peningkatan ketegangan di LCS dapat menjurus ke konflik terbuka dan

berimplikasi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, upaya pencarian solusi damai untuk menangani sengketa di kawasan ini menjadi suatu keharusan, tidak saja bagi negara-negara yang bersengketa tetapi juga negara-negara kawasan. ASEAN, sebagai organisasi regional yang berpengaruh di kawasan dan beberapa negara anggotanya terlibat dalam sengketa LCS, perlu mengambil peran dalam pencarian solusi damai tersebut. Begitu juga Indonesia (meskipun bukan negara *claimant*, tetapi karena sebagian wilayahnya berdekatan dengan wilayah sengketa) juga perlu mengambil peran itu. Indonesia perlu memprakarsai langkah-langkah antisipatif dalam penanganan potensi konflik LCS ini dalam forum ASEAN. Peran ASEAN dan juga Indonesia tersebut ditujukan untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan agar sengketa LCS tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

## Rujukan

1. "The Republic of the Philippines v. The People's Republic of Cina, Permanen Court of Arbitration News, [http://www.pca-cpa.org/shownews.asp?nws\\_id=423&pag\\_id=1261&ac=view](http://www.pca-cpa.org/shownews.asp?nws_id=423&pag_id=1261&ac=view), diakses tanggal 5 Juni 2014.
2. "RRT Tolak Perintah Mahkamah Arbitrase", *Kompas*, 5 Juni 2014, hal. 9.
3. "Vietnam-Filipina Galang Persatuan", *Kompas*, 9 Juni 2014, hal. 10.
4. "Tiongkok Adukan Vietnam ke PBB", *Kompas*, 11 Juni 2014, hal. 8.
5. "Cina says wants to counter Vietnam's 'slander' on SCS", *The Jakarta Post*, 11 Juni 2014, hal. 10.
6. Clive Schofield and Ian Storey, "Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territory", *Asia Quaterly*, Vol. IX, No. 4, Fall 2005.
7. "South Cina Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons", EIA Overview, 7 Februari 2013, <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=scs>, diakses tanggal 2 Juni 2014.
8. Dr. Jean-Paul Rodrigue and Dr. Theo Notteboom, "Global Maritime Routes and Chokepoints", dalam *The Geography of Transport System*, <http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/ch1a2en.html>, diakses tanggal 2 Juni 2014.